

## **BAB III**

### **SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA**

Bicara sejarah Pancasila tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Apabila merunut kembali kapan Pancasila mulai dikenal terutama nilai-nilai idealnya dapat dipahami jika kita melihat masa lalu. Baik nilai intrinsik maupun ekstrinsik dalam Pancasila menunjukkan seberapa pentingnya nilai-nilai tersebut, yaitu sejak kapan mulai dikenal dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia merupakan bagian yang akan dikaji dalam bab ini.

#### **1. Latar Belakang Sejarah**

Masuknya agama di Nusantara menandai dimulainya kehidupan beragama pada masyarakat. Agama merupakan sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau dewa atau yang lain dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1995: 10). Di Indonesia dimulai dengan masuknya agama Hindu pada abad ke 7. Agama yang berdasar kitab suci Weda masuk ke Indonesia dari India yang hingga sekarang peninggalannya yang berupa candi-candi masih berdiri megah seperti candi Prambanan, candi Sari. Masuknya agama Budha sebagai agama yang diajarkan Sidharta Gautama, yaitu orang yang telah mencapai kesempurnaan Buddhisme. Agama yang dikembangkan Sidharta Gautama mengajarkan bahwa kesengsaraan adalah bagian kehidupan yang tidak terpisahkan dan orang dapat membebaskan diri dari kesengsaraan dengan menyucikan mental dan moral diri pribadi.

Kedua ajaran agama tersebut cukup lama berpengaruh di seluruh aspek kehidupan masyarakat Nusantara. Candi yang dibuat dari batu sebagai tempat pemujaan ataupun tempat menyimpan abu jenazah raja-raja atau pendeta Hindu dan Budha (pada zaman dahulu) sekarang menjadi warisan budaya yang tidak ternilai harganya. Tradisi Jawa sekarang juga merupakan bentuk akulturasi budaya dengan Hindu seperti sesaji, tabur bunga di makam sampai penghormatan terhadap

leluhur. Dalam bidang politik, ajaran Hindu-Budha berpengaruh pada kerajaan-kerajaan sebelum datangnya agama Islam. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah Sriwijaya, Kutai dan Tanjungpura di Kalimantan, Taruma dan pajajaran di Jawa Barat, Mataram di Jawa Tengah, Kediri dan Singasari di Jawa Timur, kerajaan-kerajaan di Bali (G. Mudjanto, 1989: 15).

Sebagai tempat dekat dengan bandar perdagangan Samudra Pasai maupun Selat Malaka maka di Nusantara terjadi kontak dengan berbagai bangsa termasuk pedagang Gujarat yang membawa ajaran Islam. Agama Islam merupakan agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW berpedoman pada kitab suci Alquran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Proses Islamisasi di Indonesia dilakukan oleh wali-wali. Kapan agama Islam masuk ke Indonesia, banyak versi tapi yang jelas pada abad ke-13 sudah ada pemeluk Islam di Nusantara terbukti dari berbagai peninggalan sejarah.

Bagaimana agam-agama merubah kehidupan dan pandangan masyarakat dapat dilihat pada sistem sosial-ekonominya. Penyelenggaraan perdagangan di kota-kota pelabuhan menimbulkan komunikasi terbuka, sehingga terjadi mobilitas sosial baik horizontal maupun vertikal serta perubahan gaya hidup dan nilai-nilai.

Pusat pemasaran barang-barang menarik pedagang dari berbagai kebudayaan. Oleh karenanya sistem mengharuskan suatu keterbukaan, saling mengenal adat-istiadat yang berbeda-beda dan saling toleransi. Sistem keterbukaan tersebut menjadi *conditio sine qua non* bagi perdagangan, dan dapat mengurangi sistem feodal (Sartono Kartodirdjo, 1987: 19). Struktur kekuasaan di kota-kota masih bersifat feodal, meskipun para penguasa tidak lagi mempunyai ikatan dengan penguasa pusat (kerajaan), karena mereka terlibat dalam perdagangan yang menjamin kebebasan dan keterbukaan dengan masyarakat.

Kota-kota pelabuhan tidak hanya menciptakan kontak sosial tetapi juga menyediakan ruang sosial untuk perubahan dan pembaharuan. Toleransi yang ada memungkinkan beberapa sistem kepercayaan saling bereksistensi secara berdampingan. Menganut kepercayaan baru dapat dilakukan dengan timbulkan konflik sosial yang minimal. Apabila sistem kepercayaan baru dapat memberikan

dukungan dan pembenaran dari status sosial golongan tertentu akan membuat masyarakat bisa menerima perubahan karena sudah ada unsur-unsur protagonisnya (Sartono K, 1987: 20). Di Kota-kota pelabuhan atau pantai terdapat protagonis Islam, seperti di Tuban, Gresik dan Cirebon. Gaya hidup masyarakat di Tuban Islam berkembang menunjukkan ciri-ciri abangan, yaitu adanya campuran Islam dan Jawa-Hindu.

Sebagai vasal Majapahit, penguasa Tuban sejak lama dapat mempertahankan otonominya, sehingga pemeluk agama Islam tidak akan menimbulkan tentangan hebat dari Majapahit. Disisi lain persaingan perdagangan telah menimbulkan pengelompokan pedagang. Adanya ketergantungan penjual pada pembeli mendorong orientasi hubungan lain terutama pada pembeli yang kuat, seperti pedagang Arab, Parsi, Gujarat, Benggala, mereka punya wibawa terhadap pedagang Jawa. Agama dan kebudayaan mereka dipandang sebagai prestise oleh pedagang Jawa, sehingga sudah diciptakan kecenderungan menerima agama baru itu. Otonomi juga memberi kecenderungan untuk memeluk agama Islam, karena bagi penguasa lokal agama Islam merupakan lambang dan sebagai kekuatan menghadapi kekuasaan pusat yang berideologi Hindu. Konversi keagamaan Islam mempermudah hubungan perdagangan internasional yang sebagian besar sudah mereka kuasai. Di lain pihak kekuasaan pusat dengan agama Hindu dan Budha mengalami kemerosotan bersamaan dengan disintegrasi politik dan degenerasi kultural. Akibatnya terciptalah kondisi yang baik bagi suatu perubahan. Dalam politik juga kemudian lahir kerajaan-kerajaan Islam di Pantai Utara Jawa.

Gambaran persebaran Islam menunjukkan proses yang cepat, terutama sebagai dahwah para wali dalam penyebaran Islam di Jawa. Proses Islamisasi yang cepat sampai ke wilayah-wilayah lain di Nusantara juga menunjukkan pengaruh agama bagi kehidupan manusia. Sampai kemudiaan perdagangan juga membawa kontak dengan bangsa Eropa yang di mulai Portugis pada 1512, Spanyol yang membangun benteng pertahanan di Tidore 1527, kemudian Belanda 1602 membentuk VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie). Bangsa Eropa seperti halnya bangsa-bangsa Asia yang lain selain melakukan perdagangan juga

menyebarkan agama. Agama Katholik dan agama Kristen kemudian juga diterima di Nusantara sebagai agama dan kepercayaan yang melengkapi agama-agama sebelumnya. Pada saat Indonesia menjadi negara merdeka maka kelima agama yaitu: Hindu, Budha, Islam, Katholik, dan Kristen menjadi agama yang diakui dan disayahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setelah reformasi agama Kong Hu Chu juga diterima dan menjadi agama keenam yang diakui negara.

## **2. Sejarah Pergerakan Indonesia**

Sebelum negara Indonesia terbentuk pada 17 Agustus 1945, bentuk pemerintahan adalah kerajaan-kerajaan baik besar maupun kecil yang tersebar di Nusantara. Sejarah Indonesia selalu menyebutkan bahwa ada dua kerajaan besar yang melambangkan kemegahan dan kejayaan masa lalu yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Sriwijaya berdasar beberapa bukti sejarah (Muara Takus abad ke 7) yaitu di wilayah Palembang, Palembang sendiri dalam sejarah dikenal sebagai pusat ziarah agama Buddha. Di daerah Talaga Batu terdapat banyak batu yang bertuliskan *siddhayatra*, yang artinya mungkin perjalanan suci yang berhasil (Sartono Kartodirdjo, dkk, 1977: 53). Di bukit Si Guntang juga ditemukan arca Budha yang sangat besar dan diperkirakan berasal dari abad ke-6. Menurut laporan Cina, Sriwijaya mashur sebagai pusat agama Budha. Raja-raja tampil sebagai pelindung agama Budha dan penganut yang taat.

Pada abad ke-13 Sriwijaya masih menguasai wilayah sebagian besar Sumatra, dan Semenanjung Malaka serta sebagian Barat pulau Jawa atau Sunda. Kerajaan Sriwijaya mempunyai tentara yang kuat yang digambarkan tangkas dalam perang di darat maupun di laut, maka layak jika kekuasaannya banyak dan luas. Pada permulaan abad ke-15 muncul beberapa kerajaan Islam di bagian Utara pulau Sumatra, dan ini berarti berakhirnya beberapa kerajaan Hindu dan Budha di Sumatra.

Majapahit merupakan kerajaan terbesar kedua yang wilayahnya meliputi hampir seluruh Nusantara, yaitu di daerah-daerah Sumatra bagian Barat sampai ke daerah-daerah Maluku dan Irian di bagian Timur (sekarang Papua). Kekuasaan

Majapahit diluaskan ke negara-negara tetangga di Asia tenggara dalam bentuk persahabatan. Gajah Mada sebagai patih masa Hayam Wuruk telah menjadikan kerajaan Majapahit sebagai kerajaan besar dan berkuasa. Dengan Sumpah Palapanya, Gajah Mada membuktikan pengabdianya pada Majapahit.

Meninggalnya Gajah Mada (1364) dapat dianggap merupakan detik-detik awal keruntuhan Majapahit dan semakin mundur dengan wafatnya Hayam Wuruk (1389). Kapan keruntuhan Majapahit juga banyak versi yang berbeda, tetapi dari berita Portugis dan Italia mengatakan bahwa pada permulaan abad ke-16 kerajaan Majapahit masih berdiri, yang disebutnya sebagai kerajaan Hindu (Sartono, dkk. 1977: 272). Akan tetapi berdasar berita lain menyatakan pada tahun 1518-1521 penguasaan atas Majapahit beralih ketangan Adipati Unus dari Demak Sejak itu Majapahit beralih dari kerajaan Hindu ke kerajaan Islam.

Awal abad ke-16 bangsa Eropa mulai masuk ke Nusantara dan terjadilah perubahan politik kerajaan yang berkaitan dengan perebutan hegemoni. Belanda telah meletakkan dasar-dasar militernya pada tahun 1630an guna mendapat hegemoni perdagangan atas perniagaan laut di Indonesia. VOC sebagai perwakilan dagang Belanda di Indonesia mendirikan markas besarnya di Batavia dan mulai menguasai wilayah-wilayah perdagangan di Nusantara. Pada pertengahan abad XVII Belanda tidak puas hanya dengan perjanjian perdamaian, pembangunan benteng-benteng dan pertahanan Angkatan Laut untuk memperkokoh kekuasaan Belanda. VOC masih menganggap terdapat kekacauan baik besar maupun kecil dari penguasa-penguasa kerajaan di Nusantara yang dapat mengacaukan rencana mereka. Kebijakan militer VOC menjadi semakin agresif dengan ikut campur tangan dalam urusan kerajaan-kerajaan. Dengan demikian mulailah kekuasaan Belanda terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara.

Kekuasaan Belanda dimulai memang dari Indonesia bagian Timur sebagai pusat rempah-rempah yaitu di Maluku, kemudian ke Sulawesi, Nusa Tenggara sampai Jawa. Dengan demikian kekuasaan raja-raja di Nusantara harus menghadapi Belanda. Sebelumnya jika terjadi persaingan antar keluarga kerajaan atau antar kerajaan, maka Belanda akan mendukung salah satunya. Jika berhasil

maka Belanda akan mendapat imbalan yang menguntungkan secara ekonomis ataupun politis. Kekuasaan VOC berakhir pada 31 Desember 1799, kemudian aset-asetnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Karenanya sejak abad XIX Belanda menguasai Nusantara dalam seluruh aspek kehidupan atau menjadikan koloninya. Kekuasaan itu terus berlangsung hingga Jepang merebutnya pada tahun 1942.

### 3. Menuju Kemerdekaan

Kontak dengan bangsa Eropa telah membawa perubahan-perubahan dalam pandangan masyarakat yaitu dengan masuknya paham-paham baru, seperti liberalisme, demokrasi, nasionalisme. Paham-paham tersebut sebenarnya telah muncul abad 18 di Eropa, tetapi masuk dan berkembang di Indonesia baru abad XX awal, kecuali liberalisme.

Pada 1870 Belanda telah membuat kebijakan untuk daerah koloninya yang disebut Hindia Belanda ini dengan “liberalisasi”. Ide-ide liberal yang berkembang di Nederland telah memberi pengaruh kuat terutama dalam bidang ekonomi. Ajarannya di bidang ekonomi yakni menghendaki dilaksanakannya usaha-usaha bebas dan pembebasan kegiatan ekonomi dari campur tangan negara atau pemerintah (G. Mudjanto: 1989: 19). Diantara golongan liberal terdapat golongan humanis, dan merekalah yang menghendaki untuk dihapusnya *cultuurstelsel* atau tanam paksa. Suatu usaha yang dilakukan VOC maupun pemerintah Belanda yang memberi keuntungan besar pada mereka tetapi tidak bagi rakyat pribumi

Berkat perjuangan golongan liberal dan humanis maka *cultuurstelsel* sedikit demi sedikit mulai dihapuskan. Pada tahun 1870 dianggap sebagai batas akhir berlakunya *cultuurstelse* dan dikeluarkan Undang-Undang Agraria yang mengatur bagaimana pengusaha swasta memperoleh tanah untuk usahanya dan Undang-Undang Gula yang mengatur pemindahan perusahaan-perusahaan gula ke tangan swasta.

Kaum liberal pada dasarnya kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat sehingga banyak mendapat kritik, diantaranya dari C. Th. Van Deventer yang menulis di majalah *de Gids* 1899 berjudul *Een Eereschuld* atau *Debt of Honour*

atau Balas Budi. Dikatakan oleh Van deventer bahwa kemakmuran Belanda diperoleh karena kerja dan jasa orang Indonesia. Oleh karena itu Belanda berhutang budi pada rakyat Hindia Belanda dan harus membayarnya dengan menyelenggarakan Trias: irigasi, emigrasi (transmigrasi) dan edukasi. Berkaitan dengan pengajaran, yang dilaksanakan hanyalah pengajaran tingkat rendah, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai rendah, mandor-mandor atau pelayan-pelayan yang bisa membaca dan upah mereka lebih rendah dari pelayan kulit putih.

Beberapa sekolah menengah juga sekolah tinggi memang dibuka, tetapi bagi rakyat jelata tidak ada kemungkinan menyekolahkan anaknya karena biaya mahal. Sekolah-sekolah tersebut untuk kepentingan pemerintah bukan untuk kemajuan pribumi. Dapat dipahami bagaimana kondisi intelektual masyarakat yang tidak mengenal pendidikan (Barat), sehingga menjadi wajar jika paham-paham Eropa itu baru muncul dan dikenal abad XX setelah adanya pendidikan.

Nasionalisme sebagai sebagai *State Nation* atau negara bangsa, sampai abad XX belum ada negara Indonesia. Sampai abad ke XIX perlawanan terhadap Belanda masih bersifat lokal (kedaerahan). Perlawanan masih bersifat negatif seperti mengundurkan diri ke daerah yang belum terjangkau kekuasaan kolonial ataupun mencari perlindungan pada kekuatan gaib. Model perlawanan seperti itu selalu mengandalkan pemimpin yang kharismatik yang dianggap pengikutnya mempunyai kesaktian. Perlawanan seperti itu akan berakhir jika pemimpinnya di tawan atau terbunuh.

Sesudah 1900 sifat perlawanan mengalami perubahan yaitu, perlawanan bersifat nasional, perlawanan positif dengan senjata, taktik modern, diplomasi (model Barat). Perlawanan juga diorganisir lebih baik, juga mulai memikirkan masa depan bangsa. Apa sebenarnya yang dapat mendukung pertumbuhan nasionalisme di Indonesia. Perkembangan pendidikan barat menggeser pendidikan tradisional seperti pondok, pesantren, wihara-wihara telah menimbulkan masalah tersendiri. Adanya homogenitas agama di Indonesia dengan 90% Islam dapat mendesak nasionalisme sebagai suatu hal positif yang

memberi kemungkinan berbeda. Meskipun demikian nasionalisme dapat menjadi kuat di kalangan masyarakat karena adanya kesamaan juga kesamaan agama. Demikian pula dengan kesamaan bahasa yang dapat menumbuhkan kesatuan. Dengan menentang orang Indonesia memakai bahasa Belanda menandai jarak antara orang Indonesia dan Belanda, di samping juga untuk menghilangkan kesempatan orang Indonesia berhubungan dengan dunia luar. Oleh karena itu masyarakat telah menggunakan bahasa Melayu sebelum nasionalisme berkembang dan justru membuat pemerintah Belanda bergetar, karena bahasa mampu menjadi senjata psikologis untuk aspirasi nasional bangsa Indonesia (George Mc Turnan Kahin: 1995: 51).

Memberikan pendidikan Barat kepada penduduk Indonesia terutama kaum elite telah disesali Belanda. Belanda juga takut terhadap perkembangan Islam dan perkembangan Islam selama ini dianggap sebagai kesalahan Belanda, karena dalam Islam tidak hanya sekedar ikatan biasa tetapi juga merupakan simbol kelompok untuk melawan asing (penjajah) dan menindas suatu agama yang berbeda (sebagai hasil penelitiannya Snouck Hurgronje yang dikutip George Mc Turnan Kahin, 1995: 50). Maka pemerintah menjamin bahwa orang-orang Indonesia yang memperoleh pendidikan Barat harus dijamin bakal memperoleh kedudukannya dalam kalangan pegawai negeri. Bila itu tidak dilaksanakan maka orang Indonesia akan semakin jauh dari Belanda dan pemerintah Belanda akan mengawasi kaum terpelajar terutama terhadap arah dan tujuan serta propaganda Pan-Islamisme (George Mc Turnan Kahin, 1995: 62). Dengan demikian perlawanan terhadap kolonial telah semakin tegas dilakukan masyarakat Indonesia yaitu dengan model Barat.

Sementara itu Jepang mengalahkan Sekutu di Pearl Harbour pada 8 Desember 1941 dan kemudian mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia pada tahun 1942. Janji Jepang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan dan memajukan rakyat Indonesia. Akan tetapi dalam kenyataannya Jepang juga merampas kehormatan rakyat dan terjadi kemiskinan dimana-mana. Janji Jepang baru mulai direalisasikan setelah Jepang makin terdesak oleh Sekutu. Sekutu segera



bangkit dari kekalahan Jepang dan mulai merebut pulau-pulau antara Australia dan Jepang dan pada April 1944 mendarat di Irian Barat. Pemerintah Jepang kemudian berusaha mendapat dukungan penduduk Indonesia, yaitu saat Perdana Menteri Kaiso pada 7 September 1944 mengucapkan pidato di parlemen Jepang yang antaranya mengatakan akan memberikan kemerdekaan Indonesia, kemudian dikenal sebagai “Kaiso Declaration”. Janji itu terasa lambat sekali jika dibandingkan Philipina dan Burma yang diberi kemerdekaan masing-masing pada 1 Agustus 1943. Kelambatannya kemungkinan karena (G. Moedjanto, 1989: 84) :

1. Pemimpin-pemimpin Indonesia dan Jepang belum mengadakan perjanjian apapun
2. Berhubungan dengan hal pertama Jepang terpaksa mempertimbangkan waktunya
3. 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan BPUPKI terjadi tawar menawar antar Indonesia dan Jepang
4. 5 April 1945 Kaiso jatuh dan Kabinet Suzuki yang menggantikannya tidak bisa segera mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan pernyataan Kaiso

#### **4. Lahirnya Pancasila**

Sebagai realisasi janji Jepang maka pada hari ulang tahun Kaisar Hirohito tanggal 29 April 1945 Jepang memberi semacam “hadiah ulang tahun” kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kedua dari pemerintah Jepang berupa “kemerdekaan tanpa syarat. Tindak lanjut janji tersebut dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan nama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), yang dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Zyunbi Tioosakai*. Pada hari itu diumumkan nama-nama ketua serta para anggotanya sebagai berikut:

Ketua : Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat

Ketua Muda : Ichubangase (seorang anggota luar biasa

Ketua Muda : RP. Soeroso (Merangkap ketua)

Enam puluh anggota biasa bangsa Indonesia tidak termasuk ketua dan ketua muda dan mereka kebanyakan berasal dari Jawa, tetapi ada juga yang berasal dari Sumatera, Sulawesi, Maluku, beberapa peranakan Eropa, Cina dan Arab.

## **1. Sidang Pertama BPUPKI**

BPUPKI mulai bekerja pada tanggal 28 Mei 1945 pada tanggal 28 Mei 1945, dimulai upacara pembukaan dan pada kesesok harinya dimulai sidang-sidang (29 Mei -1 Juni 1945). Yang menjadi pembicaranya adalah Mr. Muh. Yamin, Mr. Soepomo, Drs. Moh. Hatta, dan Ir. Soekarno. Sayangnya sekali notulen sidang pertama sebanyak 40 halaman telah hilang dan sampai sekarang belum ditemukan, sehingga banyak catatan sejarah sidang tersebut tidak diketahui bangsa Indonesia. Hanya berdasar saksi hidup dapat dirunut garis-garis besar yang dibicarakan dalam sidang tersebut.

### **a. Isi Pidato Mr. Muh Yamin**

Di dalam bukunya Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan bahwa pada tanggal 29 Mei 1945 itu beliau berpidato tentang rancangan.usulan dasar negara sebagai berikut:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat (Kaelan, 2000:35).

Tetapi notulen pidato Mr. Muh. Yamin ini tidak terdapat di dalam arsip nasional.

### **b. Isi Pidato Mr. Soepomo**

Sidang tanggal 31 Mei 1945 menyetujui pembicara Mr. Soepomo. Beliau adalah seorang ahli hukum yang sangat cerdas dan masih muda usia waktu itu. Di dalam pidatonya Mr. Soepomo menjelaskan bahwa dasar pemerintahan suatu negara bergantung pada *staatsidee* yang akan

dipakai. Menurut Soepomo, di dalam ilmu negara ada beberapa aliran pikiran tentang negara yaitu:

**Pertama**, aliran pikiran perseorangan (individualis) sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes (abad 17), Jean Jacques Rousseau (abad 18), Herbert Spencer (abad 19) dan Harold J Laski (abad 20). Menurut aliran pikiran ini negara ialah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak seluruh orang dalam masyarakat itu (kontrak sosial). Susunan negara ini terdapat di Eropa Barat dan Amerika.

**Kedua**, aliran pikiran tentang negara berdasar teori golongan (*class theory*) sebagaimana diajarkan Karl Marx, Engels dan Lenin. Negara dianggap sebagai alat dari suatu golongan (suatu kelas) untuk menindas kelas yang lain. Negara ialah alatnya golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan lain yang mempunyai kedudukan lemah. Negara kapitalis ialah perkakas borjuis untuk menindas kaum buruh, oleh karena itu para Marxis menganjurkan revolusi politik untuk merebut kekuasaan.

**Ketiga**, Aliran pikiran lainnya: teori integralistik yang diajarkan Spinoza, Adam Muller, Hegel, dan lain-lain (abad 18-19). Menurut aliran pikiran ini negara tidak menjamin kepentingan seseorang atau golongan tetapi kepentingan masyarakat seluruhnya. Negara ialah susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala anggota hubungannya erat dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Negara tidak memihak kepada golongan yang paling kuat atau paling besar, tetapi menjamin kepentingan dan keselamatan hidup bagi seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Setelah memaparkan ketiga teori tersebut Soepomo menawarkan kepada hadirin untuk memilih aliran pikiran mana yang akan digunakan dari ketiganya itu. Kemudian Soepomo sendiri mengusulkan bahwa tiap-tiap negara memiliki keistimewaan sendiri-sendiri, maka politik pembangunan negara Indonesia harus disesuaikan dengan *sociale structur* masyarakat

Indonesia sekarang dan panggilan zaman. Beliau menolak faham individualistis karena contohnya di Eropa dengan menggunakan faham ini orang mengalami krisis rohani yang maha hebat. Demikian pula susunan negara Soviet Rusia yang bersifat diktator proletariat bertentangan dengan sifat masyarakat Indonesia yang asli. Prinsipnya, persatuan antara pimpinan dan rakyat, prinsip persatuan dalam negara seluruhnya yang menurut Soepomo ini cocok dengan aliran ketimuran dan masyarakat Indonesia. Semangat kebatinan dari bangsa Indonesia adalah persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti, dunia luar, dunia batin, mikrokosmos dan makrokosmos, rakyat dan pemimpin. Pemimpin sejati sebagai petunjuk jalan ke arah cita-cita yang luhur yang didamkan rakyat.

Soepomo juga setuju dengan pendapat Moh. Hatta bahwa negara yang didirikan itu bukan negara Islam, tetapi negara persatuan. Kalau negara Islam, maka berarti negara mempersatukan diri dengan golongan terbesar yaitu golongan Islam dan tentu akan timbul soal *minderheeden* bagi golongan agama yang lain. Di dalam negara nasional yang bersatu dengan sendirinya urusan agama akan diserahkan kepada golongan agama yang bersangkutan (Bahar, 1995: 33-43).

### **c. Isi Pidato Ir. Soekarno**

Pada hari keempat sidang pertama BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mendapat giliran menyampaikan gagasannya mengenai dasar-dasar bagi Indonesia merdeka. Pidato Ir., Soekarno sangat menarik dan sering mendapat applus dari anggota sidang yang lain. Pada intinya, Ir. Soekarno pertama-tam memaparkan dasar-dasar Indonesia merdeka sebagaimana diminta oleh ketua BPUPKI dibicarakan di dalam sidang tersebut belum dibahas secara jelas oleh para pembicara sebelumnya. Menurut Ir. Soekarno, dasar bagi Indonesia merdeka itu adalah dasarnya suatu negara yang akan didirikan yang disebutnya *philosophische grondsag*, yaitu fundamen, filsafat, jiwa, pikiran yang sedalam-dalamnya yang di

atasnya akan didirikan gedung Indonesia yang merdeka. Setiap negara mempunyai dasar sendiri-sendiri demikian pula hendaknya Indonesia.

Selanjutnya Ir. Soekarno mengusulkan kepada sidang bahwa dasar bagi Indonesia merdeka itu disebut Pancasila, yaitu:

1. Kebangsaan (nasionalisme)
2. Kemanusiaan (internasionalisme)
3. Musyawarah, mufakat, perwakilan
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Jika anggota sidang tidak setuju dengan rumusan yang lima di atas, maka rumusan itu dapat diperas menjadi tiga yang disebutnya Trisila, yaitu:

1. Sosio-nasionalisme
2. Sosio-demokrasi
3. Ketuhanan

Rumusan Trisila dapat pula diperas menjadi satu sila yang disebut oleh Ir. Soekarno sebagai Ekasila, yaitu gotong-royong. Menurut Ir. Soekarno gotong-royong adalah ide asli Inonesia.

Setelah Ir. Soekarno berpidato maka sidang pertama BPUPKI dianggap sudah cukup, karena usulan tentang dasar-dasar Indonesia merdeka telah banyak. Selain usulan yang disampaikan secara lisan (pidato), para anggota jug diminta memberi usulan secara tertulis. Kemudian, dibentuklah suatu panitia kecil berjumlah delapan orang untuk menyusun dan mengelompokkan semua usulan tersebut. Panitia delapan terdiri dari:

1. Ir. Soekarno
2. Drs. Moh Hatta
3. Sutardjo
4. K.H. Wachid Hasyim
5. Ki Bagus Hadikoesoemo
6. Oto Iskandardinata
7. Moh. Yamin

8. Mr. A.A. Maramis

Setelah para panitia kecil yang berjumlah delapan orang tersebut bekerja meneliti dan mengelompokkan usulan yang masuk, diketahui ada perbedaan pendapat dari para anggota sidang tentang hubungan antara agama dan negara. Para anggota sidang yang beragama Islam menghendaki bahwa negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki bahwa negara tidak mendasarkan hukum salah satu agama tertentu. Untuk mengatasi perbedaan ini maka dibentuk lagi suatu panitia kecil yang berjumlah sembilan orang (dikenal sebagai Panitia Sembilan), yang anggotanya berasal dari golongan nasionalis, yaitu:

1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Mr. Moh Yamin
3. K.H Wachid Hasyim
4. Drs. Moh. Hatta
5. K.H. Abdul Kahar Moezakir
6. Mr. Maramis
7. Mr. Soebardjo
8. Abikusno Tjokrosujoso
9. H. Agus Salim

Panitia sembilan bersidang tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan kesepakatan atau suatu persetujuan yang menurut istilah Ir., Soekarno adalah suatu modus, kesepakatan yang dituangkan di dalam Mukadimah (Preamble) Hukum Dasar, alinea keempat dalam rumusan dasar negara sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Moh. Yamin mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta.

## **2. Sidang Kedua BPUPKI**

Pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 Ir. Soekarno diminta menjelaskan tentang kesepakatan tanggal 22 Juni 1945 (Piagam Jakarta). Oleh karena sudah mencapai kesepakatan maka pembicaraan mengenai dasar negara dianggap sudah selesai. Selanjutnya dibicarakan mengenai materi undang-undang dasar (pasal demi pasal) dan penjelasannya. Penyusunan rumusan pasal-pasal UUD diserahkan kepada Mr. Soepomo. Demikian pula mengenai susunan pemerintahan negara yang terdapat dalam Penjelasan UUD.

Sidang BPUPKI kedua ini juga berhasil menentukan bentuk negara jika Indonesia merdeka. Bentuk negara yang disepakati adalah republik dipilih oleh 55 dari 64 orang yang hadir dalam sidang. Wilayah negara disepakati bekas Hindia Belanda ditambah Papua dan Timor Portugis (39 suara)

## **3. Pembentukan PPKI**

Sementara itu kedudukan Jepang yang terus menerus terdesak karena serangan balik Sekutu. Komando Tentara Jepang di wilayah Selatan mengadakan rapat pada akhir Juli 1945 di Singapura. Disetujui dalam rapat tersebut bahwa kemerdekaan bagi Indonesia akan diberikan pada tanggal 7 September 1945, setahun setelah pernyataan Koiso. Akan tetapi dalam bulan Agustus terjadi perubahan cepat dan tanggal 7 Agustus Jendral Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI = *Dokuritu Zyunbi Inkai*) yang bertugas melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan karena akan diadakannya pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia.

Anggota PPKI terdiri dari 21 orang dengan ketua Ir. Soekarno dan Wakil Ketua Drs. Moh. Hatta. Secara simbolis PPKI dilantik oleh Jendral

Terauchi dengan mendatangkan Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Rajiman Wedyodiningrat, bekas ketua BPUPKI ke Saigon pada tanggal 9 Agustus 1945. Dalam pidatonya Terauchi mengatakan cepat lambatnya kemerdekaan bisa diberikan tergantung kerja PPKI. Dalam pembicaraan Terauchi dengan para pemimpin Indonesia tanggal 11 Agustus 1945, ia mengatakan bahwa kemerdekaan akan diberikan tanggal 24 Agustus 1945. Akan tetapi perkembangan cepat justru terjadi setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki.

Setelah kembali dari Saigon pada tanggal 14 Agustus 1945 di Kemayoran Ir. Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga dan kemerdekaan itu bukan merupakan hadiah dari Jepang melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu Ir. Soekarno atas tanggung jawab sendiri menambah jumlah anggota yang lain sebanyak 18 orang sehingga jumlah seluruhnya ada 21 orang. Agar sifat panitia persiapan kemerdekaan itu berubah menjadi badan pendahuluan bagi Komite Nasional. Selain dari Jawa, tujuh orang anggota khusus didatangkan dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Bali agar representatif mewakili rakyat Indonesia yang tersebar di Nusantara. Setelah itu anggota PPKI masih ditambah enam orang lagi wakil golongan yang terpenting dalam masyarakat Indonesia. Adapun enam orang tersebut adalah 1) Wiranatakusuma, 2) Ki Hadjar Dewantara, 3) Mr. Kasman Singodimedjo, 4) Sajuti Malik, 5) Mr. Iwa Kusuma Sumantri, 6) Achmad Soebardjo.

## **5. Lahirnya Negara Indonesia**

Dalam pelaksanaan proklamasi sendiri ternyata terdapat perbedaan antara golongan tua dan golongan muda tentang kapan pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda yang lebih agresif menghendaki kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Yang termasuk golongan muda adalah: Soekarno, Adam Malik, Kusnaini, Sutan Syahrir, Sayuti Malik, Soedarsono, Soepomo, dll. Sutan Syahrir sebagai tokoh pertama yang menginginkan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta



tanpa menunggu janji Jepang, karena ia telah mendengar siaran radio tentang kekalahan Jepang. Perbedaan itu memuncak dengan diamankannya Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok oleh para pemuda agar tidak mendapat pengaruh Jepang. Atas desakan pemuda dan massa, akhirnya Soekarno-Hatta bersedia memproklamsikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia.

#### Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus Tahun 05

Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno – Hatta

#### **6. Sidang Pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945**

Sidang pertama PPKI dilaksanakan setelah Proklamasi Kemerdekaan, dipimpin oleh ketua Ir. Soekarno dan wakil ketua Drs. Moh. Hatta dan dihadiri anggota sejumlah 25 orang. Agenda sidang mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar. Ir. Soekarno sebagai ketua meminta agar anggota sidang mengikuti garis-garis besar yang telah dirancang dalam sidang kedua BPUPKI. Oleh karena kerja sidang yang kilat, maka perubahan-perubahan kecil dikesampingkan dulu supaya hari itu juga sudah ada UUD, presiden dan wakil presiden. Terdapat perubahan yang telah dilakukan sebagai hasil pembicaraan dengan beberapa anggota dan kemudian Ir. Soekarno mempersilahkan Drs. Moh Hatta sebagai wakil ketua untuk menjelaskan mengenai perubahan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar serta pasal-pasal nya. Drs. Moh Hatta membacakan Rancangan Pembukaan (hasil rancangan Panitia Kecil) dengan perubahan pada sila pertama (tujuh buah kata dihilangkan dan diganti dengan kata-kata Yang Maha Esa) dan beberapa perubahan pada rancangan UUD. Setelah itu Ir. Soekarno membacakan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar

yang telah disepakati bersama dan pada saat itu juga Pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal UUD tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia. Setelah itu sidang sesi pertama berakhir dan dilanjutkan lagi pada sesi kedua pukul 12.34 WIB.

Pada sesi kedua, Ir. Soekarno meminta Mr. Soepomo menjelaskan tentang pandangan umum, yaitu tentang *opzet* (rencana) Undang-Undang dasar ini. Soepomo menjelaskan pokok-pokok pikiran untuk UUD sebagai berikut:

1. Kedaulatan negara ada di tangan rakyat, penjelmaan rakyat di dalam badan MPR
2. MPR menetapkan UUD, mengangkat presiden dan wakil presiden, menetapkan GBHN
3. Presiden dan wakil Presiden berada di bawah MPR
4. Di samping Presiden ada DPR yang bersama Presiden membentuk Undang-Undang
5. Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-mentri negara
6. Menteri-mentri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
7. Untuk tingkat pusat, selain DPR ada DPA yang memberikan pertimbangan kepada pemerintah (presiden dan wakil presiden)
8. Di bawah pemerintah pusat ada pemerintah daerah dan pemerintah asli tetap dihormati, misalnya Sultanat-sultanat, Konti-konti, Desa, dsb.

Setelah istirahat kedua, sidang dibuka kembali pukul 1.45 WIB dengan acara pengangkatan presiden, wakil presiden dan pembentukan KNIP. Atas usul anggota sidang, Oto Iskandardinata pemilihan presiden diselenggarakan secara aklamasi dan ia mengajukan calon yaitu Ir. Soekarno sendiri sebagai presiden. Usulan itu disambut dengan tepuk tangan anggota sidang. Setelah Ir. Soekarno menyatakan kesediannya menjadi presiden, maka semua anggota berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sesudah itu seluruh anggota berseru "Hidup Bung Karno" tiga kali. Demikian pula Oto Iskandardinata mengusulkan wakil presiden adalah Drs. Moh. Hatta dan inipun disetujui oleh anggota yang lain. Hal yang sama dilakukan pula pada Bung Hatta seperti terhadap Bung

Karno. Selanjutnya sidang hari itu membicarakan rancangan aturan peralihan sebagaimana dikenal selama ini.

Di dalam aturan peralihan tersebut dinyatakan pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Alasan pembentukan Komite Nasional ialah mungkin sekali anggota-anggota dari PPKI tidak lama lagi akan meninggalkan Jakarta (yang berasal dari luar Jakarta), maka perlu ada suatu komite di Jakarta untuk kepentingan membantu presiden yang anggota-anggotanya dapat bertemu dalam waktu cepat. Komite ini setara kedudukannya dengan MPR (Bahar, 1995: 445-450).

## DAFTAR PUSTAKA

- Kaelan, 2001, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma
- Kahin, George Mc Turnan, 1995, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*, Surakarta: UNS Press
- G. Moedjanto, 1989, *Indonesia Abad Ke-20 I Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati*, Yogyakarta: Kanisius.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sartono Kartodirdjo, 1987, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sartono Kartodirdjo, dkk, 1977, *Sejarah Nasional Indonesia II*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sjafroedin Bahar, dkk. (ed), 1995, *Risalah Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI*, Jakarta: Sekretariat Negara RI